

## Prostitution in Padang City 1891-1942

Riska Putriani<sup>a\*</sup>, Suriani<sup>a\*</sup>

<sup>a</sup>Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Indonesia

\*[riskaputriani22@gmail.com](mailto:riskaputriani22@gmail.com), [suriani@uinbukittinggi.ac.id](mailto:suriani@uinbukittinggi.ac.id)

### Abstract

Socio-economic conditions were the background to the emergence of prostitution practices in the city of Padang in 1891-1942. This study examines socio-economic factors, and public health impacts including the spread of sexually transmitted diseases such as syphilis. This study aims to identify social and economic factors that drive the growth of prostitution in the city of Padang and analyze the Dutch government's policies in overcoming the rampant practices of prostitution. Then reveal the impacts that arise from the practices of prostitution on public health including sexually transmitted diseases and how to overcome them. This study uses a qualitative approach with a historical method that includes primary and secondary data collection. Primary data taken in this study comes from the Besluit Archives which contain decrees regarding regulations related to prostitution in West Sumatra and East Sumatra. BGS 19 November 1890, No. 2812, BGS. 19 March 1891 No. 617, CL. 29 August 1891 No. 16452 and CL. 22 November 1889, No. 21793. While secondary sources in the form of books, theses, articles, YouTube or other online media can be accessed via the city of Padang during the Dutch colonial era. The results of the study indicate that the practice of prostitution in Padang City is influenced by the social-economic conditions of the community, where poverty and lack of employment encourage some women to engage in prostitution as source of livelihood. In addition, the colonial government's policies tend to be ambivalent in both regulating and curbing this practice, creating complex dynamics. The colonial government implemented regulations aimed at controlling and monitoring the practice of prostitution. Policies often aimed to control the spread of sexually transmitted diseases with a particular focus on syphilis which was a major health problem during that period.

**Keywords:** Impact of Prostitution Practices, Colonial Government Policy, Social Conditions-Economic.

## Prostitusi di Kota Padang Tahun 1891-1942

### Abstrak

Kondisi sosial-ekonomi menjadi latar belakang kemunculan praktik prostitusi di kota Padang tahun 1891-1942. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor sosial dan ekonomi yang mendorong pertumbuhan prostitusi di kota Padang. Serta menganalisis kebijakan pemerintah Belanda dalam mengatasi maraknya praktik prostitusi. Kemudian mengungkapkan dampak yang muncul akibat praktik prostitusi terhadap kesehatan masyarakat termasuk penyakit kelamin dan cara penanggulangannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan yang mencakup pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer yang diambil pada penelitian ini bersumber dari Arsip Besluit yang berisikan surat keputusan mengenai aturan-aturan terkait prostitusi yang ada di Sumatera Barat dan Sumatera Timur. BGS. 19 November 1890. No. 2812, BGS. 19 Maret 1891. No. 617, CL. 29 Agustus 1891. No. 16452 dan CL. 22 November 1889. No. 21793. Sedangkan sumber sekunder berupa buku, skripsi, tesis, artikel, youtube ataupun media online lainnya dapat diakses lewat internet yang berkaitan dengan Prostitusi di kota Padang zaman kolonial Belanda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik prostitusi di kota Padang dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi masyarakat, dimana faktor kemiskinan dan kurangnya lapangan pekerjaan mendorong sebagian perempuan untuk terlibat dalam dunia prostitusi sebagai

sumber penghidupan. Selain itu kebijakan pemerintah kolonial yang cenderung ambivalen baik mengatur maupun mengekang praktik ini, menciptakan dinamika yang kompleks. Pemerintah kolonial menerapkan regulasi yang bertujuan untuk mengontrol dan memantau praktik prostitusi. Kebijakan sering kali bertujuan untuk mengendalikan penyebaran penyakit kelamin dengan fokus khusus pada syphilis yang menjadi masalah kesehatan utama selama periode itu.

**Kata Kunci:** Dampak Praktik Prostitusi, Kebijakan Pemerintah Kolonial, Kondisi Sosial-Ekonomi

## Pendahuluan

Prostitusi merupakan fenomena sosial yang telah ada sejak masa kerajaan yang ada di Nusantara dengan modus dalam bentuk perkawinan tujuannya untuk memperluas dan memperkuat kekuasaan. Pada masa kolonial perempuan menjadi status terlemah pada masanya, karena pendidikan baginya tidak dibutuhkan. Oleh sebab itu, untuk mempertahankan diri sebagian perempuan bersedia menjadi wanita simpanan. Adapun secara terang-terangan perdagangan wanita di Indonesia yang terjadi pada masa kolonial. Pada tahun 1596, bangsa Belanda dibawah pimpinan Cornelis De Houtman melakukan perdagangan ke Nusantara tujuannya mencari rempah-rempah. Hal ini tentunya adanya persaingan dalam pasar Internasional. Pada tahun 1602, membuat perusahaan VOC (*Vereenigde Oost Indische Compagnie*) sebagai perusahaan terbesar yang ada di Asia. Perdagangan yang dilakukan bukan hanya rempah-rempah saja, melainkan juga perdagangan manusia termasuk perempuan yang dijadikan sebagai budak seks (Irmayani et al., 2006).

Pada abad ke-17, kedatangan bangsa Belanda di Kota Padang melalui jalur laut berlabuh di dua pelabuhan yang ada di Sumatera Barat yaitu Pelabuhan Muara Tiku dan Pelabuhan Emmahaven (Teluk Bayur Padang). Pada tahun 1905, seluruh penjuru wilayah Minangkabau berhasil dikuasai oleh Belanda. Setelah kedatangan bangsa Belanda di Kota Padang praktik prostitusi semakin terekspos, bahkan setiap individu melakukan bisnis gelap dengan melakukan perdagangan manusia. Menurut catatan sejarah, pelaku dari prostitusi merupakan pedagang fisik dan jasa untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Belanda juga memiliki arsip lengkap mengenai wilayah jajahannya, termasuk Kota Padang yang dimuat dalam beberapa dokumen pelaku dari praktik prostitusi oleh para Korps Militer dan Pedagang (John Ingleson et al., 1986).

Kalangan Kopsr Militer melakukan praktik prostitusi diawali dengan memperkerjakan para perempuan untuk mengurus rumahtangga. Namun beralih profesi dengan melakukan praktik sindikat perdagangan manusia, termasuk perempuan yang dijual sebagai budak seks. Adapula sebagian perempuan yang bersedia bekerja sebagai prostitusi tujuannya untuk memenuhi kebutuhan finansial. Tempat beroperasinya pekerjaan sebagai prostitusi yaitu rumah bordir, toko-toko kecil, lasmen, panji pijat, musik room dan tempat persembunyian para prajurit militer agar tidak diketahui oleh publik. Maraknya praktek tersebut serta perdagangan wanita Hindia Belanda, khususnya Kota Padang menjadi faktor munculnya penularan penyakit kelamin dan kekerasan rumah tangga sehingga tingginya tingkat perceraian. Hal ini pemerintah harus menindak lanjutin dengan membuat peraturan UU terkait pencegahan wabah penyakit kelamin (Dedi Arman et al., 2017).

Pada tanggal 8 Agustus 1927, menerbitkan surat kabar Bataviaasch Nieuwsblad yang menceritakan tentang penurunan penyakit kelamin pertama kali di benua Eropa dan Amerika. Tingginya permintaan seks dan besarnya peluang pendapatan ekonomi terhadap prostitusi sehingga pemerintah kewalahan, karena peluran wabah penyakit kelamin dikalangan Korps Meliter dan pedagang. Pada tahun 1927 pemerintah Belanda membentuk Polisi susila untuk menangani pencegahan penyakit kelamin di Kota Padang. Pemerintah membuat kebijakan untuk memelakukan pemeriksaan ke dokter, serta harus memiliki kartu kesehatan dan berafiliasi ke rumah bordir tertentu. Namun pembentukan polisi asusila ini tidak berhasil sehingga pengaruh untuk penanganan tersebut masih minim. Selain itu, penyebaran penyakit *Syphilis* makin parah diakibatkan oleh tingginya praktik prostitusi di Kota Padang. Pada tanggal 20 Agustus 1891, lahirnya surat dari direktur kehakiman mengenai peninjauan kembali di dua daerah yaitu Sumatera Barat dan Sumatera Timur terhadap pengendalian prostitusi. Surat yang dikeluarkan terkait dengan usia dalam persyaratan dengan melarang anak-anak usia 6-15 tahun masuk ke dalam dunia pelacur. Jika peraturan tersebut dilanggar maka diberikan sanksi dan hukuman (Joko Utomo et al., 2001).

Pada tahun 1933, Pemerintah Kota Padang juga mengeluarkan aturan untuk usia 6 tahun wajib dinikahkan, tujuannya menghindari tingginya praktik prostitusi. Peraturan ini mendapatkan pro dan kontra terhadap praktik tersebut di Kota Padang, penerimaan peraturan ini terhadap masyarakat karena sangat menentang akan hadirnya praktik prostitusi sehingga pemuka adat membuat peraturan sendirinya yang disebut "*Adatregel*". Kemudian penolakan terhadap peraturan ini ialah perempuan yang telah bekerja pada praktek prostitusi, sehingga kehilangan pekerjaannya membuat pekerja sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pada tahun 1942 pemerintah Belanda tercatat Korps Militer dilarang masuk untuk beroperasi, polisi militer milik pemerintah juga merazia ke rumah bordir sampai ke pusat kota, lasmen dan toko-toko kecil untuk mencegah praktik prostitusi. Namun pemerintah kolonial Belanda tidak bisa menghentikan praktik prostitusi, bahkan semakin meningkat pesat di kota-kota besar (Widia Fitri et al., 2011). Penulis mengkaji prostitusi di Kota Padang Tahun 1891 sampai 1942 dengan mengetahui serta membandingkan penelitian lain yang serupa. Kegiatan prostitusi di Padang dan berbagai respon pemerintah Kolonial Belanda terkait upaya penanggulangan kegiatan prostitusi di Padang zaman kolonial.

## Metode

Penelitian ini memakai metode penelitian sejarah dengan pendekatan kualitatif yang mencakup pengumpulan data sumber primer dan sekunder dengan studi pustaka. Metode penelitian sejarah dilakukan dengan tahapan heuristik (pengumpulan sumber), verifikasi (kritik sumber), interpretasi, dan historiografi (penulisan). Pada tahapan heuristik, sumber primer yang dipakai adalah Arsip Besluit yang memuat data tentang surat keputusan mengenai aturan-aturan terkait prostitusi yang ada di Sumatera Barat dan Sumatera Timur. Sumber primer antara lain BGS. 19 November 1890, BGS. 19 Maret 1891, No. 617, CL. 29 Agustus 1891, No. 16452 dan CL. 22 November 1899. No. 21793. Sedangkan sekunder berupa buku, skripsi, artikel, dan situs web resmi yang menyediakan sumber akurat yang berkaitan dengan prostitusi kolonial di Kota Padang. Sumber

yang dikumpulkan tersebut kemudian dianalisis dan dibandingkan dengan sumber sezaman lainnya, seperti sumber surat kabar, untuk kemudian dituliskan fakta sejarah yang sesuai.

## Hasil dan Pembahasan

### A. Kondisi Sosial-Ekonomi Kota Padang Tahun 1891-1942 yang Mempengaruhi Perkembangan Prostitusi

#### 1. Kondisi Sosial Kota Padang

Pada abad ke-19 dipengaruhi oleh kolonialisme yang mendorong terjadinya urbanisasi. Pengaruh tersebut menciptakan ketidakstabilan sosial. Sebelum Kota Padang dipengaruhi oleh Kolonial masyarakat masih didominasi kokohnya sistem adat istiadat bagi masyarakat Minangkabau. Masyarakat Minangkabau dikenal sebagai ibu etnis Melayu yaitu Matrilialisme dengan kedudukan perempuan lebih dihargai. Hal ini mempengaruhi struktur keluarga dan kepemilikan harta pusaka. (Rusli Amran et al., 1986) Setelah Ranah Minangkabau dipengaruhi oleh kedatangannya bangsa kolonial sehingga kebudayaan barat yang tidak sesuai dengan aturan adat istiadat menjadi cacat. Banyak masyarakat melanggar aturan tersebut, hal ini dikarenakan semakin tingginya tingkat kebutuhan hidup dan rendahnya pendapatan.

Berdasarkan penduduk asli yang ada di Kota Padang juga cenderung sebagai pedagang dan pelaut. Pada masa kolonial Belanda, masyarakat Belanda terbagi beberapa lapis sosial, yaitu kelas atas dan kelas bawah. Kelas atas terdiri dari pemuka adat, saudagar kaya, tokoh agama. Sedangkan kelas bawah terdiri dari petani, nelayan dan buruh. Penentuan kelas dapat dilihat dari gaya hidup yang dimiliki, baik dari kekayaan yang dimiliki, pendidikan, serta politik. Sedangkan yang daerah tertinggal seperti daerah pedalaman seperti Mentawai, Suku Batak, dan Jawa jauh dari gaya hidup elit yang dipengaruhi gaya hidup luar karena budaya orang pedalaman lebih kuat akan kebudayaan dan adat istiadat seperti aturan dari leluhur, tradisi seperti tarian adat, musik tradisional, pakaian adat dan bahasa daerah masih dilestarikan (Freek Colombijn et al.,).

Adapun teori yang menjelaskan mengenai asal-usul dengan penduduk asli Kota Padang. Pertama berasal dari daerah Agam dan kedua berasal dari daerah Solok Selayo. Generasi pertama orang Padang tinggal secara berkelompok-kelompok yang disebut dengan delapan suku "*nan salapan suku*". Tiap suku dikepalai seorang penghulu daeti garis bangsawan dan mengklaim sebagai keturunan Kerajaan Pagaruyuang. Sebelum kedatangan bangsa Belanda Kota Padang terdiri dari berbagai aspek sosial antara lain: Kelompok etnis dan Agam, Kelas Sosial, Sistem Pemerintahan yang sekarang di bawah kekuasaan politik dan ekonomi dari pemerintah, keberadaan petani dan buruh yang sering rentan dipinggirkan dalam masyarakat karena masuk kedalam kelas bawah (Gusti Asna et al., 1992).

#### 2. Kondisi Ekonomi Kota Padang

Pada abad ke-19, kondisi ekonomi Kota Padang dipengaruhi oleh letak geografis yang dikenal sebagai kota pelabuhan Kolonialisme Belanda. Datangnya bangsa Belanda, kondisi ekonomi masyarakat mulai berubah yang dipengaruhi oleh sistem kolonialisme. Perdagangan dan pemerintahan semula diatur oleh masyarakat lokal, sekarang dikuasai oleh pemerintah Belanda. Masyarakat lokal dipaksa untuk bekerja sebagai buruh, sementara

hasil diambil sendiri oleh Belanda. Masyarakat lokal mulai kehilangan hak-haknya dan semakin tersingkirkan sejak kedatangan bangsa Belanda. Kebudayaan dan tradisi lokal mulai terkikis dan akibat budaya Belanda yang mulai merambah di Kota Padang (Elizabeth et al., 2007).

Sebelum kedatangan Belanda, Kota Padang merupakan pusat kebudayaan dan sosial masyarakat Minangkabau. Kondisi perekonomian relatif stabil, datangnya bangsa kolonial membawa perubahan besar dalam struktur perekonomian kota tersebut. Perekonomian masyarakat mulai bergantung pada sistem Kapitalisme yang diterapkan oleh Belanda. Masyarakat lokal dipaksa bekerja sehingga hasil dari masyarakat pribumi diambil dan diekspor ke negaranya. Kebijakan perekonomian masyarakat menjadi suatu kebijakan Belanda yang sebelumnya pernah dibuat yaitu VOC. Artinya kebijakan tersebut masih diperpanjang walaupun perusahaan tersebut sudah hancur namun masyarakat lokal masih dipaksa menerapkan sistem tersebut (Gusti Asnan et al., 1992).

Akibat banyaknya tekanan pajak ataupun monopoli perdagangan yang dilakukan pemerintah Belanda membuat lapangan pekerjaan semakin sempit di Kota Padang. Sejak itulah masyarakat lokal, terutama perempuan tetap hidup dalam kehidupan kemiskinan dalam kondisi ekonomi yang sangat sulit. Oleh sebab itu, kesetaraan gender menuntut perempuan untuk mendapatkan uang dengan cepat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Praktik prostitusi menjadi jalan satu-satunya yang dilakukan oleh perempuan kala itu, bekerja sebagai budak seks dengan imingan biaya hidup ditanggung. Praktik ini dibuat oleh Korps Militer Belanda dan padangang. Aktifitas seks dilakukan dua tempat yaitu pelabuhan dan daratan. Pelabuhan menjadi tempat praktik budak seks dilakukan di kapal-kapal yang menjadi pelanggan utama adalah dari saudagar manca dunia serta kapten kapal. Sedangkan di daratan praktik jasa ini menggunakan kendaraan bendi untuk menuju ketempat pelanggan. Tempat yang menjadi operasi prostitusi ini biasanya dilakukan di rumah bordi, toko-toko kecil, panti pijat, musik room, dan tempat persembunyian lainnya (Sopan ID et al.,). Adapun faktor yang mempengaruhi prostitusi sebagai berikut.

- a. Kemiskinan dan keterbatasan kesempatan kerja bagi perempuan di Kota Padang. Hal ini dikarenakan oleh, ekonomi masyarakat dikuasai oleh Pemerintah Belanda sehingga kebijakan yang dibuat merugikan masyarakat
- b. dengan menerapkan sistem pajak yang besar dan memonopoli hasil bumi untuk memperkaya negaranya sendiri.
- c. Masuknya budaya asing yang mentoleransi maraknya prostitusi yang tidak ada diawasi oleh Pemerintah Kolonial
- d. Budaya Patriarkal norma sosial yang menempatkan perempuan menjadi derajat yang rendah dan lemah.
- e. Kesenjangan sosial dapat mempengaruhi perekonomian masyarakat.
- f. Urbanisasi pesat di Kota Padang sehingga meningkatnya populasi yang cepat akibat imigrasi penduduk dari pedalaman ke kota. Hal ini memicu peningkatan industri seks.

## **B. Kebijakan Pemerintah Kolonial terhadap Praktik Prostitusi di Kota Padang**

### **1. Regulasi dan Pengawasan Prostitusi**

Praktik prostitusi mendapatkan izin kalangan Belanda. Praktik ini berawal dari pelabuhan kota Padang yang menjadi pusat perdagangan utama di Sumatera Barat. Pada abad ke-19 praktik prostitusi berlangsung pertama kali di kapal-kapal Belanda singgah di pelabuhan Padang. Berkembangnya prostitusi disebabkan oleh *supply* dan *Demand*, berkaitan dengan tingginya kemiskinan di kalangan masyarakat "*Poorly Educated*". Sedangkan "*Supply and Demand*" merupakan pemasok dan pembeli yang dilakukan oleh laki-laki dalam membeli pelayanan seks (Erianjoni Ikhwan et al., 2012).

Berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan Belsuit 1.3 terkait peninjauan prostitusi yang ada di Sumatera Barat dan Sumatera Timur. BGS. 19 November 1890, No. 2816, BGS. 19 Maret 1891, No. 617, CL. 29 Agustus 1891, No. 1645 dan CL. 22 November 1889, No. 21793. Adanya peraturan untuk prostitusi di seluruh wilayah Hindia Belanda, termasuk Sumatera Barat dan Sumatera Timur, serta diadakan peninjauan untuk peraturan tersebut. Contohnya, pasal 7 dan 13 menjelaskan peraturan prostitusi di Padang, mencakup berbagai regulasi yang bertujuan untuk mengontrol dan membatasi praktik prostitusi (Rina Sari et al., 2021).

Berikut adalah beberapa poin terkait kebijakan tersebut:

- a. Regulasi Usai, kebijakan pemerintah Kolonial Belanda dalam mengatur usia minimal bagi pekerja seks. Usia yang ditetapkan adalah 18 tahun tujuannya untuk melindungi perempuan dari eksploitasi dan perdagangan manusia.
- b. Pendaftaran dan pengawasan, kebijakan ini ditujukan untuk calon pekerja seks dengan melakukan tahap pendaftaran awal dengan menjalani pemeriksaan kesehatan secara berkala. Pengujian untuk penyakit seksual (PMS) yang sering terjadi dalam konteks kesehatan masyarakat.
- c. Penegak hukum, peraturan yang ditetapkan penegakan hukum sering kali menjadi masalah. Banyak kasus dari pekerja seks di bawah pengawasan aparat hukum, agar praktik prostitusi berjalan dengan lancar.
- d. Perdagangan manusia, kebijakan yang tidak efektif dalam menegakkan batasan usia sering kali berkontribusi dalam perdagangan manusia. Banyak perempuan yang terjebak dalam sindikat perdagangan ini untuk dijadikan praktik prostitusi internasional dan lokal tanpa persetujuan.
- e. Stigma dan diskriminasi, kebijakan ini ditujukan untuk pekerja seks muda, walaupun ada upaya dalam melindungi tapi masih banyak mengalami diskriminasi dan marginalisasi dalam masyarakat. (Surat Direktur Kehakiman et al., 1891)
- f. Pendidikan dan kesadaran, pemerintah juga memberikan kesadaran dan pendidikan dalam pengetahuan seksual. Pendidikan untuk perempuan sangat minim apalagi kondisi ekonomi rendah, maka dari kebijakan ini mampu membantu perempuan menyandang pendidikan.
- g. Kebijakan terkait pembatasan lokalisasi, pembatasan lokasi terhadap kasus prostitusi dilakukan untuk mengontrol dan mengatur aktifitas jalannya praktik tersebut. Salah satu bentuk kebijakan dalam menetapkan zona-zona khusus di Kota Padang. Penetapan alokasi dilakukan agar aktifitas dapat terkendalikan dan tidak terlalu terlihat oleh masyarakat umum. (R. Bakker et al., 2008)
- h. Penutupan rumah bordir pada periode tertentu yang mana dianggap ilegal dan tidak mematuhi peraturan, walaupun bersifat sementara.

- i. Motivasi ekonomi dan kesehatan pengendalian penyakit. Regulasi dalam pengendalian penyakit menular.
- j. Registrasi dan gerakan sosial, upaya pemerintah untuk mengatur prostitusi beberapa organisasi dan individu dalam memperjuangkan hal-hak pekerja seks.

## **2. Kebijakan Terkait Aturan Penegakkan Hukum**

Prostitusi di Kota Padang menjadi isu yang kompleks dan kontraversional, peraturan yang diterapkan oleh pemerintahan Kolonial Belanda untuk mengendalikan praktik prostitusi. Dalam Besluit 20 Agustus 1891. Anak-anak berusia 6-15 tahun dilarang masuk rumah pelacuran, dalam “Strafwetboek” untuk orang-orang pribumi pasal 252.57 disebutkan bahwa jika ada anggota berusia dibawah 18-21 tahun akan dikenakan hukuman. Prostitusi di kota Padang menjadi isu yang kompleks dan kontraversional. Melalui konteks ini terdapat berbagai peraturan hukum yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk mengatur dan mengendalikan praktik prostitusi. Serta respons masyarakat terhadap fenomena ini. Pemerintah Belanda menyadari bahwa prostitusi adalah masalah sosial yang perlu ditangani. Sehingga mereka mulai menerapkan sejumlah peraturan untuk mengatur praktik ini. Pada awal abad ke-20 pemerintah kolonial memperkenalkan sistem registrasi bagi pekerja seks. Prostitusi tidak dilarang secara eksplisit tetapi di atur melalui berbagai undang-undang dan kebijakan. Perempuan yang bekerja sebagai pekerja seks diwajibkan mendaftar dan menjalani pemeriksaan kesehatan secara berkala. Hal ini bertujuan untuk mengendalikan penyebaran penyakit menular seksual yang dianggap sebagai ancaman bagi kesehatan masyarakat. Pemeriksaan kesehatan sering dilakukan di rumah sakit atau klinik yang ditunjuk oleh pemerintah.

Pemerintah juga menerapkan zonasi dengan menentukan area tertentu di mana prostitusi diperbolehkan. Ini bertujuan memisahkan praktik prostitusi dari kehidupan sehari-hari masyarakat dan mengurangi dampak negatifnya. Pengendalian penyebaran penyakit menular seksual yang dianggap sebagai ancaman bagi kesehatan masyarakat. Pemeriksaan kesehatan harus sering dilakukan di rumah sakit atau klinik yang ditetapkan oleh pemerintah (Besluit Gubernur Jendral et al., 1874). Penerapan zonasi dengan menentukan area tertentu dimana prostitusi diperbolehkan. Beberapa tempat hiburan diizinkan beroperasi dalam batas tertentu, pemerintah kolonial menerapkan sanksi bagi yang melanggar aturan. Pekerja seks yang tidak terdaftar dapat ditangkap dan dikenakan denda atau hukuman penjara (Arsip Nasional Republik Indonesia et al., 2001).

Penolakan praktik prostitusi banyak dilakukan oleh masyarakat sekitar Kota Padang. Beberapa pekerja seks berusaha melawan stigma dan mencari cara untuk memperbaiki kondisi pekerjaannya. Berdasarkan surat direktur kehakiman 20 Agustus 1891 mengenai peninjauan kembali peraturan-peraturan urutan prostitusi di daerah Sumatera Barat dan Keresidenan Sumatera Timur (Suryadi et al., 2018).

## **C. Dampak Prostitusi Terhadap Kesehatan Masyarakat**

### **1. Kemunculan Penyakit Kelamin**

Berkembangnya prostitusi menyebabkan munculnya penyakit kelamin, sehingga pemerintah ikut bertanggungjawab dalam mengatasi hal ini. Penyakit kelamin meluas dikalangan Militer Belanda yang tersebar melalui kontak seksual. Pada tahun 1913 pemerintah kolonial mengeluarkan kembali peraturan terkait

melarang keras operasinya pelacuran. Pada tahun 1927 pemerintah Kolonial Belanda membentuk Polisi Asusila (*Zedenpolitie*) adalah pasukan yang dibuat untuk menindak prostitusi, perdagangan perempuan, dan homoseksualitas pada daerah-daerah tertentu. Melalui polisi asusila dianggap berhasil menekan angka pelacuran, penutupan rumah bordir yang ilegal di Kota Padang. Banyaknya para Korps Militer yang bertebaran di kampung-kampung demi melepaskan hasrat dengan banyak perempuan yang disinggahinya sehingga memicu timbulnya penyakit kelamin yang tidak bisa diatasi. Biasanya penyakit kelamin banyak ditemukan di daerah pesisir terutama pasar dan pelabuhan, jika penyakit kelamin banyak ditemukan di pedalaman pada penyakit itu dibawa oleh orang pesisir (Siti Nurhaliza et al., 2017).

Kondisi kesehatan masyarakat semakin memburuk, sehingga Pemerintah Belanda mengatur prostitusi melalui "*Hygiene Ordinantie*" yang mencoba mengontrol penyebaran penyakit dengan menerapkan pemeriksaan kesehatan bagi pekerja seks. Namun pelaksanaan ini sering kali tidak merata dan kurang efektif, dampak kesehatan mental para pekerja seks yang sering diabaikan oleh masyarakat. Kesehatan para pekerja dan pelanggan menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas keamanan dan kekuatan Pemerintah Kolonial Belanda. Salah satu kekhawatiran pemerintah Belanda adalah wabah penyakit kelamin pada anggota militer. Serangan dari virus yang mewabah banyak anggota militer cukup meresahkan sepanjang abad ke-19 sampai abad ke-20. Salah satu penyakit yang mewabah para Korps Militer Belanda yaitu *Sifilis*. Penyakit ini pertama kali ditemukan di Asia Barat sekitar 3000 SM, kemudian menyebar luas ke Eropa dan seluruh penjuru dunia. Penyakit ini juga ikut terjangkit kepada masyarakat lokal yang terlibat dalam prostitusi. Penyakit *Syphilis* adalah penyakit menular melalui seksual yang disebabkan oleh bakteri *Treponema Pallidum* serta penyakit yang dikenal sejak lama dan sering dikaitkan dengan perang dan mobilitas sosial (Adhi Juanda et al., 1999).

Beberapa kelompok yang paling rentan terhadap penyakit kelamin akibat prostitusi pada zaman Kolonial Belanda sebagai berikut:

- a. Tentara Kolonial, seringkali terpapar penyakit kelamin karena tingginya angka kunjungan ke tempat prostitusi.
- b. Para pekerja pelabuhan dan pelaut, kota Padang sebagai kota pelabuhan yang sering menyewa jasa seks untuk dikunjungi ke pelabuhan.
- c. Kaum pria dan wanita pribumi yang bekerja di lingkungan prostitusi.
- d. Kaum perempuan pribumi yang dipaksa masuk dunia prostitusi, dijebak dan diperdagangkan ke pasar gelap internasional untuk dijadikan budak seks tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan tersendiri dari orang yang memaksanya (A Gani Jaelani et al., 2013).

Penyebaran penyakit *Syphilis* disebabkan oleh infeksi bakteri *Treponema Pallium* yang penularannya melalui kontak luka yang terinfeksi pada vagina, penis, anus, bibir dan mulut. Penyakit ini sering disebut sebagai raja singa, gejala awal penyakit ini tidak nyeri dan bertahap. Praktik prostitusi yang umum pada masa itu meningkatkan resiko penyakit kelamin termasuk *Sifilis*. Banyak tentara dan pekerja kolonial terlibat dalam hubungan seksual dengan pekerja seks (Joko Prasetyo et al., 2022).

## **2. Upaya Pencegahan Penyakit Kelamin**



Pencegahan penyakit kelamin yang dialami oleh pekerja seksual juga diusahakan oleh Pemerintah Kolonial Belanda agar minimnya penyebaran penyakit tersebut. Orang Melayu tradisional mengobati penyakit dengan ramuan tradisional rempah-rempah seperti air rebusan pacar Cina (gadung). Sedangkan orang Minangkabau dengan membawanya ke dukun untuk turut merekomendasikan ramuan tradisional dari tanaman tertentu. Makin maraknya dan ganasnya penyakit kelamin ini sulit untuk disembuhkan karena praktik prostitusi masih dilakukan dengan cara bersembunyi-sembunyi (Arsip Nasional Republik Indonesia et al., 1935). Pemerintah kolonial Belanda menerapkan berbagai kebijakan dan upaya untuk mengendalikan dalam mengurangi tingkat penyebaran penyakit kelamin sebagai berikut:

- a. Pemerintahan kolonial menetapkan aturan yang ketat untuk mengendalikan prostitusi termasuk melakukan pengawasan terhadap rumah bordir.
- b. Pemeriksaan kesehatan rutin untuk para pekerja seks.
- c. Pembuatan distrik khusus dan zona merah pemerintah Belanda sebagai lokasi aktif prostitusi yang diizinkan oleh pemerintah (Dinas Kesehatan Militer *s-Gravenhage* et al., 1899).
- d. Pengobatan medis dokter kolonial di kota-kota besar; terdapat dokter Belanda yang mempraktikkan pengobatan modern tetapi jumlahnya terbatas.
- e. Isolasi pasien penghindaran hubungan seksual orang terinteraksi sering kali disarankan untuk berhubungan seksual sampai sembuh.
- f. Memberikan pendidikan dan kesadaran terhadap seksualitas dan penyebaran penyakit yang disebabkan hubungan seksual bebas.
- g. Stigma sosial berdampak terhadap penyakit kelamin sangat kuat menyebabkan orang merasakan malu untuk mengakui kondisi dan pengobatan.
- h. Melakukan pengobatan herbal seperti kunyit, jahe akar anjalai, beras yang belum dikupas, akar rumput sarit, akar tebu, akar padi siarang dicampur jadi satu obat kemudian diminum. Rebusan sirih dengan akar bunga putih dan akar anjalai serta daun tapak leman direbus bersamaan, kemudian bisa diminum. Air kelapa hijau, nanas mentah, akar basong berduri bera, kemudian juga direbus dan diminum airnya. Madu dan lemon dicampur juga bisa membantumeningkatkan daya tahan tubuh. Perbanyak mengkonsumsi sayur dan buah segar (Dedy Arsa et al., 2023).

Sedangkan pengobatan medis yang digunakan masyarakat pada masa kolonial adalah:

- a. Merkuri menjadi pengobatan umum yang digunakan untuk mengobati penyakit *Syphilis*. Meskipun efek yang ditimbulkan sangat berbahasa tapi menggunakan merkuri sebagai obat pencegahan menyebarnya penyakit kelamin ini.
- b. Salvarsan (*Arsenobenzo*) merupakan obat pertama yang efektif digunakan untuk mengobati *Syphilis*.
- c. Lodida Kalium juga bisa digunakan sebagai pengobatan *Syphilis* meskipun bersifat larutan.
- d. Obat Atiseptik digunakan mengobati gejala luar dari *Syphilis* meskipun bersifat simptomatik (Cohen Dorsey et al., 2015).

## Simpulan

Berdasarkan hasil kajian penelitian penulis prostitusi di Kota Padang pada zaman kolonial Belanda menjadi fenomena sosial yang tidak hanya mencerminkan dinamika ekonomi dan sosial masyarakat, serta menggambarkan interaksi antar budaya lokal serta pengaruh dari sistem kolonialisme. Melalui analisis mendalam penelitian ini telah menunjukkan bahwa prostitusi bukan hanya sebagai praktik sosial tetapi juga integral dari sistem ekonomi yang luas. Selain itu penelitian ini juga mengungkapkan bahwa pemerintahan kolonial Belanda memiliki peran penting dalam pengaturan dan pengawasan praktik prostitusi. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah seperti pendaftaran rumah bordir dan regulasi kesehatan. Menunjukkan upaya dalam mengontrol penyakit menular seksual dan moralitas publik. Namun, dibalik kebijakan tersebut terdapat ambivalensi dari pemerintah dalam mengatur prostitusi, sementara disisi lain mendapatkan keuntungan dari pajak dan regulasi bisnis yang dibuat.

Berdasarkan sudut pandang budaya prostitusi di Kota Padang mencerminkan penggeseran nilai-nilai sosial akibat pengaruh kolonial. Interaksi antara budaya lokal dan budaya Belanda menghasilkan dinamika baru dalam hubungan gender dan seksualitas. Hal ini menciptakan ketegangan antar nilai-nilai tradisional dan modernitas yang dibawa oleh kolonialisme. Lebih jauh penelitian ini menunjukkan bahwa prostitusi tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat tetapi juga mempengaruhi struktur sosial secara keseluruhan. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang prostitusi di kota Padang selama zaman kolonial Belanda. Melalui pertimbangan konteks ekonomi, sosial, budaya juga dapat memahami bagaimana praktik ini berkembang dan beradaptasi dalam menghadapi tantangan zaman. Penelitian ini juga memberikan ruang diskusi lebih lanjut terhadap dampak jangka panjang dari prostitusi dalam konteks sejarah Indonesia serta implikasinya terhadap isu-isu gender dan hak asasi manusia.

## Daftar Pustaka

- Amran, Rusli, 1980, *Sumatera Barat hingga Plakat Panjang*, Jakarta: Sinar Harapan.
- Arman, Dedi, *Wanita Publik Zaman Kolonial Belanda*, 2017.
- Arsa, Dedy, 2023, *Melacak Jejak Raja Singa di Pedalaman Minangkabau*, tirta-id Sosial Budaya.
- Arsip Nasional Republik Indonesia, *Pemberantasan Prostitusi di Indonesia Masa Kolonial*, 2001, Jakarta.
- Asip Nasional Republik Indonesia, 1935 tentang *Penyakit Menular Seksual di Padang*.
- Asnan, Gusti, *Padang Akhir Abad XIX dan Awal Abad XX: Profil Kota Padang*, Padang: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Penelitian Universitas Andalas, 1992.
- Bakrie, R, *Prostitutie in de Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*, University Press, 2008.
- Besluit Gubernur Jendral, *Pemberantasan Prostitusi 21 Januari 1874, No. 4*.
- Cohen Dorsey, *The History of Syphilis: A Review*, American Journal of Public Health, 2015.
- Dinas Kesehatan Militer 10 Oktober 1899, kepada Komisi Kesehatan di *s-Gravenhage*.
- Erianjoni, dkk, 2012, *Pola Jaringan Prostitusi Terselubung di Kota Padang*, Humanus.
- Fitri, Widia, 2011, *Islam dan Adat Minangkabau dalam Karya Hamka Perspektif Hemerneutika*. Pusat Penelitian IAIN Imam Bonjol Padang.

- Freek Colombijn, *Paco-Paco Kota Padang Sejarah Sebuah Kota di Indonesia pada Adad Kedua Puluh dan Penggunaan Ruang*, BWSB, 1994.
- Graves, E Lizabeth, *Asal Usul Elite Minangkabau Modern: Repon Terhadap Kolonial Belanda Adab XIX/XX*, (Jakarta Yayasan Obor Indonesia, 2007).
- Ingleson, John, *Prostitution in Colonial Java*, dalam David P. Chandler dan M.C Ricklefs (ed), *Nineteenth and Twentieth Century Indonesia; Essay in Honour of Professor J.D Legge* (Australia: Centre of Studies Monash University, 1986).
- Irmayani, 2006, *Pembentukan Perilaku Pelacuran Belatar Tradisi di Kabupaten Pati dan Jepara Jawa Tengah*. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial, Vol. 11, No. 1.
- Jaelani, A Gani, *Penyakit Kelamin di Java 1912-1942*, Syabas:Books, 2013.
- Juanda, Adhi, *Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin*, Edisi ke-3, Jakarta: Balai Penerbit FKUI. 1999.
- Nurhaliza, Siti, *Kesehatan Masyarakat di Kota Padang pada Zaman Kolonial Belanda*, ( Padang: Penerbit Universitas Andalas, 2017).
- Pasetyo, Joko, *Dampak Sosial dan Kesehatan dari Prostitusi di Sumatera Barat*, Jurnal Sejarah Kesehatan, 2022.
- Sari, Rina, 2021, *Prostitusi dan Kebijakan Kesehatan di Sumatera Barat pada Zaman Kolonial*, Jurnal Sejarah dan Budaya.
- Sopan.ID, Literasi, *Prostitusi Era Kolonial, Lurah Bermuka Dua dan Bisnis Gelap Polisi*.
- Surat Direktur Kehakiman, *Sejarah Penanggulangi Prostitusi di Wilayah Hindia Belanda 20 Agustus 1891*.
- Suryadi, 2018, *Prostitusi dan Penegakkan Hukum di Sumatera Barat pada Zaman Kolonial*, Jurnal Sejarah dan Budaya, Vol. 10 No. 1.
- Utomo, Djoko, 2001, *Arsip Nasional Republik Indonesia, Pemberantas Prostitusi di Indonesia Masa Kolonial*, Jakarta: ANRI.22